

PENGARUH KUALITAS INFRASTRUKTUR SEBAGAI SALAH SATU PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ahmad Roadin

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
adin.roadin97.ar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mereview tentang pengaruh kualitas infrastruktur pendidikan sebagai salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Dimana kualitas infrastruktur pendidikan di Indonesia saat ini masih dikatakan rendah. Banyak sekolah-sekolah tidak memiliki infrastruktur pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium, bahkan masih ada sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak dan sangat mungkin untuk roboh. Utamanya diluar Jawa mereka hanya memiliki satu gedung yang digunakan untuk dua jenjang pendidikan seperti SD dengan SMP atau SMP dengan SMA. Meskipun pemerintah sudah membuat program dan kebijakan terkait hal ini, akan tetapi program yang selama ini dilakukan pun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Tentunya ini menjadi masalah kita bersama dan menjadi PR bagi pemerintah saat ini.

Kata Kunci: *Infrastruktur, Pendidikan, program pemerintah.*

Abstract

This article review on influence of the quality education infrastructure as one of the problems of education in Indonesia. where the quality of the education infrastructure in Indonesia currently is said to be low. Many schools don't have the supporting infrastructure such as library and laboratory, in fact there are still schools have classrooms that are not viable and highly likely to collapse. The main outside Java they only have one building that was used for two-level education such as elementary with Junior High or Middle school with high school. Although the government has made the program and related policy matter, but the program as long as this don't yield significant result. Surely, this is becoming our problems together and be homework for the government at this time.

Key words: infrastructure, education, government programs.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal penting dalam sebuah negara. Pendidikan menjadi kunci dasar dari pembangunan sebuah negara itu sendiri. Sebuah negara tanpa adanya pendidikan sama halnya dengan tumbuhan tak berpupuk, dimana masyarakatnya tidak bisa berkembang dan hanya akan dibodohi oleh negara lainnya. Oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan dan mementingkan pendidikan di negara kita. Tidak hanya menyelenggarakan pendidikan saja, akan tetapi kita harus memperhatikan kualitas pendidikan dan aspek lainnya seperti infrastruktur pendidikan, kurikulum pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan lainnya yang mendukung keberhasilan sebuah pendidikan. Karena dalam melaksanakan sebuah pendidikan dibutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun non fisik, persiapan fisik yang dimaksudkan adalah kesiapan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah dan lainnya. Sedangkan persiapan non fisik adalah kemampuan guru, kurikulum yang digunakan, psikologi anak dan lainnya. Kedua aspek ini harus terpenuhi guna menunjang pelaksanaan pendidikan yang maksimal dan berkualitas.

Pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara struktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) sedangkan untuk pendidikan dijenjang perguruan tinggi adalah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI). Di Indonesia semua warganya wajib dan berhak menempuh pendidikan baik secara formal maupun non formal. Pemerintah sendiri sudah memiliki berbagai program untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun. Yaitu yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan sekolah dasar selama enam tahun dan sekolah menengah pertama selama tiga tahun.

Program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun dicanangkan pemerintah sejak 1984, sesuai dengan Inpres No 1 tahun 1984 tentang wajar, masih menghadapi permasalahan yang mengakibatkan Wajar sembilan tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada angka mengulang kelas di D/MI, dari data PSP Balitbang Depdiknas pada tahun 2004, sebesar 841.662 siswa, dengan rincian untuk kelas I sebesar 292.462 siswa (34%), kelas II sebesar 165.888 siswa (20%), kelas III sebesar 131.159 siswa (16%), kelas IV sebesar 94.829 siswa (16%), kelas V sebesar 56.776 siswa (7%), dan kelas VI sebesar 8.424 siswa (15%) serta MI sebesar 92.124 siswa (11%). Data tersebut menunjukkan bahwa angka mengulang kelas di SD/MI masih cukup tinggi terutama untuk kelas I, II, dan III. Melihat kenyataan di atas, maka upaya mengurangi angka mengulang kelas perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan program pembangunan pendidikan di Sekolah Dasar (Widiartini, dkk. 2012. p. 140). Dalam mendukung program ini terlaksana dengan baik, presiden

Susilo Bambang Yudhoyono membuat sebuah program pendukung yaitu bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan BOS. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama atau sederajat. Program ini dianggap sukses dan terlaksana hingga sekarang. Tidak hanya program wajib belajar 9 tahun, pemerintah sekarang berencana akan menggalakan program wajib belajar 12 tahun, atau sampai dengan tingkatan SMA sederajat. Sebenarnya program ini sudah dilaksanakan pada tahun 2013 dan rencananya akan dirintis kembali pada tahun 2016. Akan tetapi program ini masih terkendala dengan beberapa masalah pendidikan yang saat ini masih menjadi dilema di Indonesia. Salah satunya adalah lambatnya pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia sehingga banyak infrastruktur pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium masih belum dimiliki oleh semua sekolah di Indonesia untuk menunjang wajib belajar dua belas tahun.

Banyaknya sekolah di Indonesia yang belum tersentuh oleh infrastruktur pendidikan menjadi ironi tersendiri. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan minimnya infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, jembatan dan sarana transportasi lainnya menjadi daftar panjang permasalahan pendidikan di Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan memang menjadi PR pemerintah selama ini, jumlah anggaran APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini lantas tak usung menjadi titik terang untuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Infrastruktur pendidikan pun hanya bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah dengan label akreditasi, selebihnya mereka yang berada di daerah terpencil hanya sekedar isapan jempol belaka. Terbukti masih banyaknya sekolah yang tidak memiliki beberapa fasilitas seperti perpustakaan dan laboratorium. Bahkan yang menjadi ironi banyak sekolah-sekolah dengan gedung yang tidak layak pakai. Tidak hanya di luar Jawa saja akan tetapi di pulau Jawa sendiri masih banyak sekolah-sekolah yang dikategorikan tidak layak pakai dan membahayakan siswanya, terbukti beberapa sekolah yang menyatakan rusak (www.sindonews.com).

PEMBAHASAN

Kualitas infrastruktur pendidikan merupakan aspek utama dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang baik dan berkualitas. Kualitas infrastruktur yang baik akan menunjang pelaksanaan pendidikan yang maksimal, infrastruktur pendidikan inilah yang nantinya akan berperan untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan. Fasilitas ini nantinya akan dimanfaatkan dalam melaksanakan pembelajaran siswa sehingga tujuan yang dicapai akan terlaksana dengan baik, selain didukung dengan kurikulum yang ada. Namun sebaliknya jika kualitas infrastruktur pendidikan yang buruk inilah menjadi kendala utamanya, tak terkecuali pendidikan di Indonesia selama ini. Kurangnya sarana prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau semua daerah di Indonesia memperburuk kondisi pendidikan di Indonesia, utamanya di luar Jawa dan daerah Indonesia timur. Berdasarkan data Kemdiknas tahun 2012, jumlah ruang kelas pada

tingkat taman kanak-kanak (TK) sebanyak 149.954 ruang kelas. Dengan kondisi ruang kelas yang memprihatinkan, yaitu sebanyak 107.805 ruang kelas atau sebesar 71,89% nya dinyatakan baik. Sedangkan sebanyak 15.980 ruang kelas atau sebesar 10,66% nya dinyatakan rusak ringan dan sebanyak 26.169 atau sebesar 17,45% nya dinyatakan rusak berat. Kemudian pada tingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 944.218 ruang kelas, 716.155 atau sebesar 75,85% nya dinyatakan baik dan 107.730 ruang kelas atau sebesar 11,41% nya dinyatakan rusak ringan dan 120.333 ruang kelas atau sebesar 12,24% nya dinyatakan rusak berat. Kemudian pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dari 271.865 ruang kelas, hanya sebanyak 228.895 atau sebesar 84,19% nya dinyatakan baik. Sedangkan 32.099 ruang kelas atau sebesar 11,81% nya dinyatakan rusak ringan dan lainnya sejumlah 10.871 ruang kelas atau sebesar 4,00% nya dinyatakan rusak berat. Yang terakhir pada tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, sebanyak 228.458 ruang kelas hanya sebanyak 203.292 atau sebesar 88,98% nya yang dinyatakan baik. Sedangkan sisanya sebanyak 18.559 atau sebesar 8,12% dinyatakan rusak ringan dan sisanya sebanyak 6.610 atau sebesar 2,89% nya dinyatakan rusak berat. Jumlah ini tentunya menjadi acuan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Indonesia yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah (www.kemdikbud.go.id).

Kondisi tersebut diperparah dengan lambatnya pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, jembatan dan sarana transportasi lainnya. Sehingga pendistribusian sarana prasarana dan bahan penunjang pembangunan infrastruktur pendidikan semakin terhambat dan bergerak sangat lambat. Ditambah dengan kondisi wilayah di Indonesia yang berpulau-pulau dan banyak wilayah yang memang sangat sulit terjamah infrastruktur jalan dan transportasi baik darat maupun udara. Menurut Kemendesa terdapat 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Daftar kabupaten tersebut telah dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014 sebagai target Pembangunan Daerah Tertinggal, penyebaran daerah tertinggal sebagian besar (70%) daerah, tertinggal saat ini terdapat di kawasan timur Indonesia (www.kemendesa.go.id). Sehingga kesempatan untuk memperoleh pendidikan pun menjadi hal yang sangat sulit. Padahal sudah jelas tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (2), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dan ayat (4), Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akan tetapi pada faktanya pendidikan menjadi hal yang cukup sulit didapatkan bagi sebagian orang yang berada di daerah terpencil di Indonesia, tak terkecuali di pulau Jawa. Negara tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal pendidikan merupakan investasi bangsa di masa depan.

Dengan pendidikan inilah para generasi penerus bangsa lahir, dengan pendidikan pula banyak orang-orang cerdas muncul dan menciptakan teknologi mutakhir untuk kesejahteraan umat manusia. Namun pendidikan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang mahal bagi orang-orang yang berada di daerah terpencil dan jauh dari kata layak.

Program sekolah satu atap atau SATAP merupakan salah satu program pemerintah dalam menyikapi kurangnya infrastruktur pendidikan yaitu gedung sekolah. Terbatasnya jumlah gedung sekolah dengan jenjang pendidikan yang ada, hal inilah yang mendasari terciptanya program ini. Sehingga dengan terpaksa satu gedung sekolah digunakan oleh dua jenjang pendidikan, seperti SD dengan SMP, atau SMP dengan SMA secara bergiliran. Tentunya banyak kendala dan masalah yang harus dihadapi, terlebih fasilitas pendukung lainnya yang masih sangat terbatas. Keterbatasan infrastruktur pendidikan ini sudah tidak seharusnya terjadi di Indonesia, mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang sudah lebih dari setengah abad ini.

Selain itu program lainnya yang saling berkesinambungan adalah program SM-3T program ini untuk menyikapi masalah pendidikan di Indonesia, program SM-3T atau program sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Program ini sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk menyikapi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya terkait infrastruktur pendidikan yang sulit dijangkau. Program ini dilaksanakan dengan mengirimkan tenaga pendidikan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia yang memang masih belum tersentuh oleh pendidikan terlebih infrastruktur pendidikan. Para tenaga pendidik yang memang sudah disiapkan untuk mengajar disana nantinya akan mengabdikan dirinya selama satu tahun. Dengan berbagai keterampilan yang memang sudah dipersiapkan dan dibekali sebelum terjun langsung ke lapangan. Program ini dirasa cukup sukses dan terus dilaksanakan tiap tahunnya. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan semua daerah terpencil dan yang berada di daerah perbatasan yang memang sangat sulit dijangkau oleh infrastruktur pendidikan bisa mendapat pendidikan yang sama. Selanjutnya program ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi guna menunjang masalah pemerataan pendidikan di Indonesia yang memang seharusnya menjadi perhatian kita bersama.

Selain itu BOS bertujuan untuk membantu pembangunan operasional dan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Salah satu fokus dari BOS ini adalah untuk membangun infrastruktur pendidikan vital seperti gedung sekolah dan perpustakaan sekolah berikut pemeliharannya. Pembangunan ini dimaksudkan agar nantinya aktifitas pendidikan bisa terlaksana dengan baik. Fasilitas pendidikan yang dibangun oleh BOS nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak sekolah dan akan dipantau oleh BOS untuk melakukan pengwasan dan perawatan fasilitas yang sudah dibangun tadi. Selain membangun infrastruktur, BOS juga memberikan beasiswa kepada anak-anak

Indonesia yang dikategorikan siswa kurang mampu. Diharapkan program ini juga bisa mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “standar operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 2 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar Nasional Pendidikan”. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan SD/SDLB di kota Rp 400.000,-/siswa/tahun, SD/SDLB di kabupaten Rp 397.000,-/siswa/tahun, SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575.000,-/siswa/tahun. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570.000,-/siswa/tahun. Pada tahun anggaran 2011 dana bos telah diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012 (Widiartini, 2012. pp. 140). Dengan BOS ini tentunya bisa sedikit membantu meringankan biaya sekolah sehingga pada nantinya angka putus sekolah bisa ditangani sepenuhnya. Selanjutnya perlu adanya evaluasi dan pengawasan terkait program BOS ini, karena pada implementasinya dilapangan banyak yang disalah gunakan dan ada pula beberapa oknum yang memang memanfaatkan celah dari BOS ini.

KESIMPULAN

Kualitas infrastruktur pendidikan merupakan hal terpenting dalam menunjang pendidikan yang baik dan bermutu tinggi. Selain itu infrastruktur pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan. Jika infrastruktur pendidikan yang tersedia lengkap dan bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka secara otomatis sistem dan tujuan pendidikan yang akan dicapai dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya jika kualitas infrastruktur pendidikan yang buruk, maka akan berdampak buruk pada sistem dan tujuan pendidikan yang ada. Lambatnya pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan dan sarana transportasi, menjadi kendala utama untuk mendistribusikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan kedaerah-daerah terpencil di Indonesia utamanya di pulau jawa. Selain itu banyak faktor lain yang memengaruhi pembangunan infrastruktur pendidikan seperti ekonomi, birokrasi dan lainya. Sehingga dampak yang ditimbulkan sangatlah jelas, banyak sekolah-sekolah yang jauh dari kata layak dengan kondisi gedung yang sedanya dan lokasi yang sulit dijangkau oleh siswa maupun guru karena tidak ada infrastruktur jalan maupun transportasi yang memungkinkan untuk menjangkau sekolah yang ada. Meskipun beberapa program pemerintah sudah digalakan untuk menyikapi masalah yang ada, akan tetapi program ini tidak bisa sepenuhnya memberikan perubahan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Framita, S. R., (2013). PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 1 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 2. Nomor 2. pp. 1-7.
- Kemendesa. (2015). 183 Kabupaten Daerah Tertinggal. Di unduh dari <http://kemendesa.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal>. Pada 20 Desember 2015.
- Kemendikbud. (2015). Buku Ringkasan Data Pendidikan. Diunduh dari <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/BukuRingkasandataPendidikan/Final-Buku-saku-1112.pdf>. Pada 20 Desember 2015.
- Sindonews. (2015). 2.946 Ruangan Sekolah di Cirebon rusak. Diunduh dari <http://daerah.sindonews.com/read/807046/21/2-946-ruangan-sekolah-di-cirebon-rusak-1384759308>. Pada 20 Desember 2015.
- Widiartini., Utama., Candraningrum, D., (2012). PENGELOLAAN TK-SD SATU ATAP DI SD NEGERI LOANO PURWOREJO. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol.13. Nomor 2. pp. 138-147.